



Contents lists available at [Journal IICET](#)
JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Pengaruh PAD, dana perimbangan, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di kepulauan Nias: mediasi belanja modal

Murbanto Sinaga^{1*}, Rika Suriyanto Zalukhu², Daniel Collyn², Rapat Piter Sony Hutauruk²

¹Universitas Sumatera Utara, Indonesia

²STIE Bina Karya, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Mar 25th, 2023

Revised Apr 08th, 2023

Accepted May 07th, 2023

Keyword:

Pertumbuhan ekonomi,
Belanja modal,
Pendapatan asli daerah,
Dana perimbangan,
Efisiensi pengelolaan keuangan daerah

ABSTRACT

Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kepulauan Nias semakin melambat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam pengaruh PAD, dana perimbangan dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kepulauan Nias, baik pengaruh langsung maupun tidak langsung melalui belanja modal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan pada seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Nias dan menggunakan data sekunder. Data diperoleh secara online pada laman DJKP Kementerian Keuangan dan BPS Provinsi Sumatera Utara dengan periode observasi dari tahun 2011-2019. Metode analisis data menggunakan metode analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal. Dana perimbangan dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dana perimbangan dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan PAD dan belanja modal secara parsial berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, belanja modal ditemukan mampu memediasi pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal juga mampu memediasi pengaruh efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, disisi lain belanja modal tidak memediasi pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini berimplikasi pada perumusan kebijakan peningkatan PAD, penentuan alokasi belanja modal dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Nias.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Murbanto Sinaga,
Univesitas Sumatera Utara, Indonesia
Email: sinagamurbanto@gmail.com

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi (Baeti, 2013; Manek & Badrudin, 2016; Nuraini, 2017). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, karena banyak faktor yang harus diperhatikan dan dikelola. Sejak berlakunya Undang-Undang otonomi daerah, banyak daerah yang pertumbuhan dan

pembangunan ekonominya tidak berubah (Djadjuli, 2018). Hal ini menunjukkan kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola dan memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Kondisi tersebut terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kepulauan Nias.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, dari empat kabupaten dan satu kota di Kepulauan Nias, hanya kabupaten Nias Selatan yang mencatatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi selama periode tahun 2011 hingga 2019. Daerah lainnya, yaitu Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat dan Kota Gunungsitoli justru menunjukkan pelambatan pertumbuhan. Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi kabupaten Nias Selatan sebesar 4,29 persen, meningkat menjadi 5,18 persen pada tahun 2012. Pada tahun 2013 dan 2014 terjadi penurunan pertumbuhan, namun meningkat kembali pada tahun 2015. Tren peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten Nias Selatan terus berlanjut hingga tahun 2019, yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,03 persen, melampaui pertumbuhan pada tahun 2011.

Berbanding terbalik dengan Nias Selatan, daerah lain di Kepulauan Nias justru menunjukkan pelambatan kinerja ekonomi dalam rentang tahun 2011 hingga 2019. Kabupaten Nias mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,98 persen pada tahun 2011. Meskipun terjadi fluktuasi, namun secara statistik terlihat bahwa tren pertumbuhan ekonomi kabupaten Nias terus menurun. Hingga tahun 2019, pertumbuhan ekonomi kabupaten Nias tercatat sebesar 5,04 persen, jauh lebih rendah dibanding pertumbuhan pada tahun 2011. Kabupaten Nias Utara, Nias Barat dan kota Gunungsitoli juga mengalami kondisi yang tidak jauh berbeda. Pertumbuhan ekonomi Nias Utara pada tahun 2011 sebesar 6,75 persen, turun menjadi 4,65 persen pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Nias Barat pada tahun 2011 tercatat sebesar 5,94 persen, turun menjadi 4,82 persen pada tahun 2019. Kota Gunungsitoli mencatat angka pertumbuhan sebesar 6,29 persen pada tahun 2011 dan 6,05 persen pada tahun 2019. Dalam kurun waktu 2011 hingga 2019, secara umum kota Gunungsitoli mampu menjaga pertumbuhan di angka enam persen. Namun demikian, angka pertumbuhan pada tahun 2011 merupakan angka tertinggi selama periode tersebut.

Pertumbuhan ekonomi yang terus melambat menjadi alarm bagi pembangunan ekonomi kabupaten/kota di Kepulauan Nias. Terlebih Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seluruh kabupaten di Kepulauan Nias pada tahun 2022 masih tergolong sedang. Hanya IPM kota Gunungsitoli yang tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi kabupaten/kota di Kepulauan Nias masih tertinggal (Batubara & Retnandari, 2017; Zega et al., 2022). Pertumbuhan ekonomi harus terus didorong agar manfaat pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan (Didu & Fauzi, 2016; Purnama, 2017; Škare & Družeta, 2016; Suharlina, 2020) dan meningkatkan pembangunan manusia (Baeti, 2013; Komariah et al., 2019; Ranis, 2004) dapat dinikmati setiap daerah di Kepulauan Nias.

Studi terdahulu yang mengkaji pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan. Akan tetapi, beberapa studi tersebut fokus mengkaji pertumbuhan ekonomi pada skala yang sangat luas, yaitu seluruh kabupaten/kota di Indonesia (Aryanto & Handaka, 2017; Pambudy & Syairozi, 2019; Soleh, 2014; Waryanto, 2017) dan Sumatera Utara (Harahap et al., 2018; Panjaitan et al., 2019; Saraswati, 2018). Masih belum ada penelitian yang khusus berfokus mengkaji pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kepulauan Nias saja. Padahal, kajian-kajian seperti ini sangat diperlukan dalam perencanaan dan perumusan strategi yang berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Nias. Kajian ini menjadi urgen dilakukan mengingat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 menetapkan empat dari lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias sebagai daerah tertinggal tahun 2020-2024. Daerah tertinggal tersebut meliputi kabupaten Nias, kabupaten Nias Selatan, kabupaten Nias Utara dan kabupaten Nias Barat. Kajian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penyusunan kebijakan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Nias. Termasuk dalam memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD diketahui memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Arina et al., 2019; Manek & Badrudin, 2016; Ningsih & Noviaty, 2019; Omodero et al., 2018; Susanto & Sugiyanto, 2019). Kenaikan PAD akan mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah sehingga lebih tinggi dari periode sebelumnya (Setiyawati & Hamzah, 2007). PAD merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah. PAD akan digunakan untuk pembiayaan berbagai belanja pemerintah, termasuk belanja modal yang memiliki dampak pada pengembangan ekonomi. Dengan kata lain, PAD yang berasal dari pajak dan retribusi akan dikembalikan kepada masyarakat untuk pembangunan dan mengembangkan perekonomian, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Selain PAD, dana perimbangan secara nyata telah berdampak baik dan mampu memicu pertumbuhan ekonomi (Chandra et al., 2017). Beberapa penelitian menemukan adanya pengaruh positif dan signifikan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi (Rosita & Sutrisna, 2018; Wiraswasta et al., 2018). Beberapa komponen dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus

(DAK) juga ditemukan berdampak positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Ahaddin, 2019; Sukmawati, 2020). Transfer dana dari pemerintah pusat menjadi sumber utama belanja daerah, terutama bagi daerah yang tingkat kemandiriannya masih rendah. Oleh karena itu, peningkatan dana perimbangan berperan penting dalam mendorong pembangunan infrastruktur ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai jika infrastruktur ekonomi memadai. Dalam hal ini, infrastruktur ekonomi seperti jalan dan listrik akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, jika infrastruktur tersebut semakin membaik (Arlintang et al., 2020). Infrastruktur jalan, listrik, jembatan dan infrastruktur lainnya akan mempermudah proses produksi dan aliran distribusi barang (Iriyena et al., 2019). Hal ini akan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga geliat ekonomi semakin meningkat. Peran vital infrastruktur ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi mengharuskan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran belanja modal, sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur. Penggunaan belanja modal yang tepat sasaran akan berdampak positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa kajian membuktikan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Aluthge et al., 2021; Waryanto, 2017; Waweru, 2021).

Pembangunan infrastruktur sangat penting, terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal seperti Kepulauan Nias dan wilayah di Kawasan Timur Indonesia. Banyak daerah yang memiliki potensi alam melimpah, namun karena infrastruktur yang buruk, potensi tersebut tidak dapat digali secara maksimal. Infrastruktur ekonomi yang buruk menyebabkan biaya produksi dan logistik menjadi mahal (Wirabrata et al., 2012), akibatnya perekonomian di daerah tersebut tidak berkembang (Prasetyo & Firdaus, 2009). Belanja modal menjadi solusi jangka panjang dengan mengarahkan alokasi belanja modal untuk pembangunan fisik. Namun demikian, hal ini harus ditopang oleh sumber-sumber pendapatan daerah yang memadai. PAD dan dana perimbangan menjadi sumber utama belanja modal. Oleh karena itu, peningkatan PAD dan dana perimbangan sangat berdampak terhadap belanja modal (Muttaqin et al., 2021; Wati & Fajar, 2017). Apabila PAD dan dana perimbangan mempengaruhi belanja modal, dan belanja modal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan, maka ada kemungkinan belanja modal dapat memediasi hubungan antara PAD dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, belanja modal dapat menentukan bagaimana PAD dan dana perimbangan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, terutama penentuan tujuan alokasi belanja modal.

Selain memperkuat basis sumber-sumber pendapatan daerah, efisiensi pengelolaan keuangan daerah juga turut menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi. Tingginya pendapatan daerah yang dihasilkan menjadi tidak berarti apabila tingkat efisiensi anggaran sangat rendah. Efisiensi anggaran artinya menghindari pemborosan anggaran untuk hal-hal yang tidak memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang ditargetkan perlu memperhatikan prinsip efisiensi. Biaya-biaya untuk merealisasikan pendapatan harus ditekan serendah mungkin. Dengan adanya penghematan anggaran, maka akan tersedia banyak uang yang dapat digunakan untuk membiayai keperluan yang lebih urgent, terutama pembangunan infrastruktur ekonomi. Singkatnya, efisiensi pengelolaan keuangan daerah akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditegaskan oleh penelitian Nurulita et al. (2018) dan Putra (2020) yang menemukan bahwa efisiensi anggaran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kajian terhadap pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan secara berkesinambungan, terlebih di daerah-daerah yang pembangunan ekonominya masih tertinggal, seperti Kepulauan Nias. Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis pengaruh PAD, dana perimbangan dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kepulauan Nias, baik secara langsung maupun tidak langsung. (2) menguji peran belanja modal dalam memediasi hubungan antara PAD, dana perimbangan dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Terdapat setidaknya dua alasan yang menjadi urgensi dari penelitian ini, yaitu (1) masih belum ada penelitian yang khusus berfokus mengkaji pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kepulauan Nias. (2) pertumbuhan ekonomi daerah-daerah di Kepulauan Nias semakin melambat, sehingga perlu adanya kajian yang dapat berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Nias. Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam perumusan kebijakan peningkatan PAD, penentuan alokasi belanja modal dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Nias.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Variabel yang diuji dalam penelitian ini meliputi PAD, dana perimbangan dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel independen, belanja modal sebagai variabel intervening dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen. Penelitian dilakukan pada kabupaten/kota di Kepulauan Nias, yang terdiri dari kabupaten Nias, kabupaten Nias Selatan, kabupaten

Nias Utara, kabupaten Nias Barat dan kota Gunungsitoli. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang digunakan meliputi data realisasi PAD, realisasi dana perimbangan, data realisasi pendapatan dan belanja daerah, serta data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kepulauan Nias periode tahun 2011-2019. Data diperoleh secara online pada laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJKP) Kementerian Keuangan <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412> dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara <https://sumut.bps.go.id/indicator/52/74/2/-seri-2010-pertumbuhan-ekonomi-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-kabupaten-kota.html>.

Metode analisis data menggunakan metode analisis jalur (path analysis). Analisis jalur merupakan metode analisis yang dikembangkan dari metode analisis regresi linier berganda, sehingga memungkinkan untuk mengkaji pengaruh langsung maupun tidak langsung variabel-variabel yang dihipotesiskan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 26. Tahapan analisis data yang ditempuh diawali dengan uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, sedangkan pengujian multikolinearitas data dilakukan dengan memperhatikan nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Pengujian autokorelasi menggunakan Run Test, sementara uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser. Apabila dari hasil uji asumsi klasik tidak ditemukan adanya masalah, maka tahap analisis dilanjutkan ke tahap pengujian hipotesis.

Uji hipotesis terdiri dari uji signifikansi parsial (uji t) dan uji analisis jalur. Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai probabilitas signifikansi uji t < 0,05. Sebaliknya, jika nilai probabilitas signifikansi uji t > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen. Uji analisis jalur bertujuan untuk menguji kelayakan variabel belanja modal dalam memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel belanja modal dinyatakan mampu memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen jika pengaruh tidak langsung lebih besar dari pengaruh langsung, dan sebaliknya jika pengaruh tidak langsung lebih kecil dari pengaruh langsung, maka variabel belanja modal dinyatakan tidak memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Model yang akan dianalisis dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{LnZ} = a + b_1\text{LnX}_1 + b_2\text{LnX}_2 + b_3\text{X}_3 + e \dots\dots\dots (1)$$

$$Y = a + b_4\text{LnX}_1 + b_5\text{LnX}_2 + b_6\text{X}_3 + b_7\text{LnZ} + e_2 \dots\dots\dots (2)$$

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah (1) Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, (2) Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal, (3) Efisiensi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, (4) Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, (5) Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, (6) Efisiensi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, (7) Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, (8) Belanja modal memediasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, (9) Belanja modal memediasi pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi, (10) Belanja modal memediasi pengaruh efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil dan Pembahasan

Pengujian asumsi klasik

Uji asumsi klasik dilakukan terhadap kedua model penelitian. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Ringkasan hasil pengujian disajikan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1 Ringkasan Hasil Uji Normalitas

	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
Model 1	0,200	Berdistribusi normal
Model 2	0,200	Berdistribusi normal

Sumber: Data diolah (2023)

Tabel 1 menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) Model 1 dan Model 2 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data kedua model penelitian berdistribusi normal.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Model 1		Model 2		Keterangan
	Tolerance	VIF	Tolerance	VIF	
Pendapatan asli daerah	0,581	1,721	0,554	1,805	Tidak terjadi multikolinearitas
Dana perimbangan	0,317	3,154	0,190	5,275	Tidak terjadi multikolinearitas
Efisiensi pengelolaan keuangan daerah	0,459	2,177	0,312	3,209	Tidak terjadi multikolinearitas
Belanja modal	-	-	0,388	2,580	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data diolah (2023)

Tabel 2 menunjukkan nilai tolerance seluruh variabel independen pada Model 1 dan Model 2 lebih besar dari 0,1. Sedangkan nilai VIF seluruh variabel independen pada Model 1 dan Model 2 lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada kedua model penelitian.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji Autokorelasi

	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
Model 1	0,548	Tidak terjadi autokorelasi
Model 2	0,071	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data diolah (2023)

Tabel 3 menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) Model 1 dan Model 2 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada kedua model penelitian. Tabel 4 menunjukkan nilai probabilitas signifikansi seluruh variabel independen pada Model 1 dan Model 2 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada kedua model penelitian.

Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig. Model 1	Sig. Model 2	Keterangan
Pendapatan asli daerah	0,297	0,342	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Dana perimbangan	0,516	0,727	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Efisiensi pengelolaan keuangan daerah	0,994	0,376	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Belanja modal	-	0,722	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah (2023)

Pengujian Hipotesis

Model 1 menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap belanja modal. Sedangkan Model 2 menguji pengaruh PAD, dana perimbangan, efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Ringkasan hasil analisis regresi terhadap kedua model penelitian disajikan dalam Tabel 5. Berdasarkan hasil analisis Model 1, terlihat bahwa hanya PAD yang berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal. Sementara dana perimbangan dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini disimpulkan berdasarkan nilai probabilitas signifikansi PAD yang ternyata lebih besar dari 0,05 ($0,166 > 0,05$), sedangkan nilai probabilitas signifikansi variabel dana perimbangan dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah lebih kecil dari 0,05. Koefisien regresi seluruh variabel independen pada Model 1 bertanda positif. Berdasarkan hasil pengujian ini, maka hipotesis pertama, kedua dan ketiga diterima.

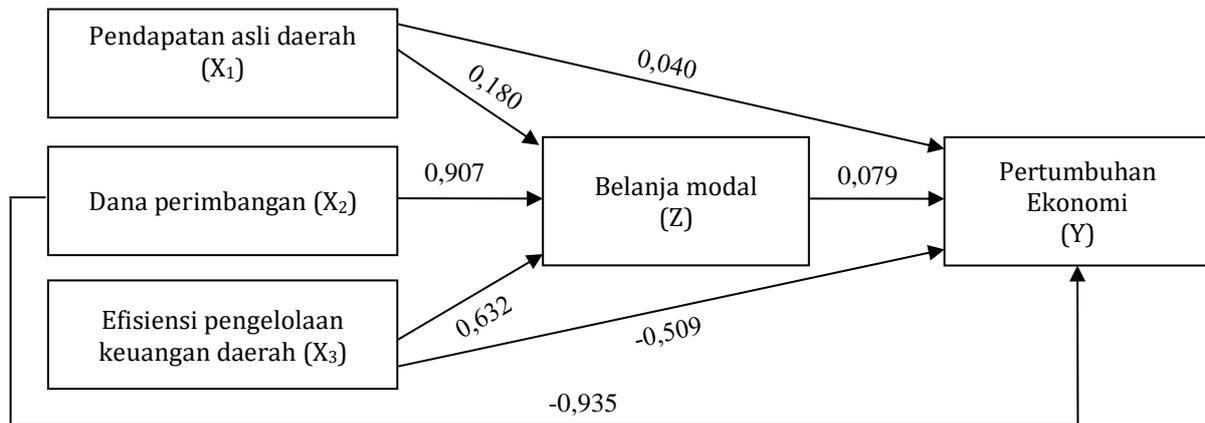
Tabel 5. Ringkasan Hasil Analisis Regresi

Variabel	Model 1		Model 2	
	B	Sig.	B	Sig.
Pendapatan asli daerah	0,057	0,166	0,035	0,812
Dana perimbangan	0,572	0,000	-1,620	0,002
Efisiensi pengelolaan keuangan daerah	0,563	0,000	-1,245	0,029
Belanja modal	-	-	0,216	0,698
R Square	0,612		0,371	
Adjusted R Square	0,584		0,309	
F-Stats	21,599		5,908	
Prob (F-Stats)	0,000		0,001	

Sumber: Data diolah (2023)

Hasil estimasi terhadap Model 2 menunjukkan bahwa dana perimbangan dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan PAD dan belanja modal secara parsial berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap belanja

modal. Simpulan tersebut didasarkan pada nilai koefisien regresi dan probabilitas signifikan uji t yang dihasilkan dari estimasi Model 2 seperti tersaji di dalam Tabel 5. Koefisien regresi PAD bertanda positif (0,035) dengan nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,812 > 0,05$). Koefisien regresi dana perimbangan bertanda negatif (-1,620) dengan nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$). Efisiensi pengelolaan keuangan daerah memiliki koefisien regresi bertanda negatif (-1,245) dengan nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,029 < 0,05$). Sementara belanja modal memiliki koefisien regresi bertanda positif (0,216) dengan nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,698 > 0,05$). Berdasarkan hasil estimasi Model 2, maka hipotesis kelima dan keenam ditolak, sedangkan hipotesis keempat dan ketujuh diterima.



Gambar 1. Analisis Jalur

Tabel 6. Ringkasan Hasil Analisis Jalur

Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung
$X_1 \rightarrow Z$	0,180	
$X_2 \rightarrow Z$	0,907	
$X_3 \rightarrow Z$	0,632	
$X_1 \rightarrow Y$	0,040	
$X_2 \rightarrow Y$	-0,935	
$X_3 \rightarrow Y$	-0,509	
$Z \rightarrow Y$	0,079	
$X_1 \rightarrow Z \rightarrow Y$		0,014
$X_2 \rightarrow Z \rightarrow Y$		0,071
$X_3 \rightarrow Z \rightarrow Y$		0,049

Sumber: Data diolah (2023)

Tabel 6 menunjukkan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh langsung PAD terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,040, sedangkan pengaruh tidak langsung melalui belanja modal sebesar 0,014. Jika dibandingkan, maka diketahui pengaruh langsung lebih besar dibanding pengaruh tidak langsung ($0,040 > 0,014$). Oleh karena itu, hipotesis kedelapan yang berbunyi belanja modal memediasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi ditolak. Dalam hal ini, belanja modal tidak memediasi hubungan antara PAD dengan pertumbuhan ekonomi. Posisi belanja modal sebagai variabel intervening tidak memperkuat pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh langsung dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar -0,935, sedangkan pengaruh tidak langsung melalui belanja modal sebesar 0,071. Dalam hal ini, diketahui pengaruh tidak langsung lebih besar dari pengaruh langsung. Oleh karena itu, hipotesis kesembilan yang berbunyi belanja modal memediasi pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi diterima. Belanja modal memediasi hubungan antara dana perimbangan dengan pertumbuhan ekonomi. Sebagai variabel intervening, belanja modal berperan memperkuat pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh langsung efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar -0,509. Sedangkan pengaruh tidak langsung jauh lebih besar, yaitu 0,049. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal mampu memediasi hubungan antara efisiensi pengelolaan keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, hipotesis kesepuluh yang berbunyi belanja modal memediasi pengaruh efisiensi pengelolaan

keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi diterima. Belanja modal sebagai variabel intervening dapat memperkuat pengaruh efisiensi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Kepulauan Nias. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ayem & Pratama (2018), Lutpikah & Mahendra (2020). PAD merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang nantinya dialokasikan untuk membiayai belanja pemerintah, termasuk belanja modal. Dalam hal ini peningkatan PAD seharusnya memberikan dampak terhadap peningkatan belanja modal. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dampak peningkatan PAD tidak signifikan dalam mendongkrak jumlah belanja modal. Hal ini kemungkinan disebabkan PAD kabupaten/kota di Kepulauan Nias masih sangat rendah.

Pada tahun 2019, dari lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias, hanya kabupaten Nias yang memiliki tingkat kontribusi PAD terhadap total pendapatan diatas 10 persen, itu pun besaran kontribusinya hanya 11 persen saja. Daerah lainnya seperti Nias Selatan memiliki tingkat kontribusi 2 persen, Nias Utara memiliki tingkat kontribusi 7 persen, Nias Barat memiliki tingkat kontribusi sebesar 2 persen, dan kota Gunungsitoli memiliki tingkat kontribusi 4 persen. Rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mengindikasikan ketergantungan pemerintah daerah terhadap belanja rutin dan pembangunan dari transfer pemerintah pusat melalui dana perimbangan sangat tinggi (Rani et al., 2010). Artinya, belanja modal kabupaten/kota di Kepulauan Nias sebagian besar bersumber dari dana perimbangan, bukan dari PAD. Hal inilah yang menyebabkan pengaruh PAD tidak signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal

Hasil analisis menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Kepulauan Nias. Artinya, peningkatan dana perimbangan ikut berdampak signifikan terhadap peningkatan belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wati & Fajar (2017) dan Muttaqin et al. (2021). Sama halnya dengan PAD, dana perimbangan juga merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah. Bagi daerah dengan tingkat kemandirian keuangan rendah seperti daerah-daerah di Kepulauan Nias, dana perimbangan merupakan sumber utama belanja rutin maupun pembangunan. Hal ini sangat menjelaskan temuan penelitian ini bahwa sumber utama belanja modal kabupaten/kota di Kepulauan Nias berasal dari dana perimbangan. Dengan demikian, peningkatan maupun penurunan dana perimbangan sangat berdampak terhadap belanja modal.

Pengaruh Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal

Hasil analisis menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Kepulauan Nias. Artinya, peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah ikut berdampak signifikan terhadap peningkatan belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Oktavianti & Idayati (2020) dan Putri & Rahayu (2019). Efisiensi pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan upaya penghematan anggaran. Penghematan anggaran akan menghasilkan dana hasil dari penghematan yang dilakukan. Dana tersebut dapat dialokasikan untuk membiayai belanja pemerintah yang sifatnya *urgent*. Artinya, efisiensi pengelolaan keuangan dapat berdampak positif terhadap belanja modal, karena dana hasil penghematan anggaran dapat menambah belanja modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kepulauan Nias. Nilai PAD yang relatif sangat rendah menjadi alasan utama pengaruh PAD tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kepulauan Nias. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kontribusi PAD kabupaten/kota di Kepulauan Nias terhadap total pendapatan dalam APBD sangat rendah, akibatnya pertumbuhan ekonomi sepenuhnya ditopang oleh dana perimbangan dari pemerintah pusat, karena belanja daerah baik belanja rutin maupun belanja modal hampir seluruhnya berasal dari dana perimbangan, bukan PAD. Hasil penelitian ini sejalan dengan Tuwo et al. (2021) dan Talangamin et al. (2018).

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil analisis menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kepulauan Nias. Artinya, apabila dana perimbangan meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Manek & Badrudin, 2016). Temuan penelitian ini tidak sesuai dengan dugaan awal dimana dana perimbangan akan memacu pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian justru menunjukkan hal sebaliknya, peningkatan dana perimbangan memicu penurunan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota di Kepulauan Nias belum dialokasikan secara maksimal pada pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Manek & Badrudin, 2016).

Belanja daerah dari fungsi ekonomi lebih banyak dialokasikan untuk belanja barang jasa dibanding belanja modal seperti terlihat pada Gambar 2.

Pengaruh Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil analisis menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kepulauan Nias. Artinya, semakin efisien pengelolaan keuangan daerah maka pertumbuhan ekonomi semakin menurun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurulita et al. (2018). Pengelolaan keuangan daerah yang efisien mengandung makna bahwa total pengeluaran pemerintah cenderung lebih kecil dari total pendapatan. Semakin kecil rasio efisiensi menunjukkan pengelolaan keuangan daerah semakin efisien. Pengeluaran pemerintah sesungguhnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Teori Keynes, pengeluaran pemerintah yang relatif tinggi akan meningkatkan permintaan agregat, yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hal ini dikonfirmasi oleh penelitian Ambya (2020) dan Terminanto & Rama (2017) yang menemukan adanya pengaruh positif dan signifikan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori Keynes dan hasil penelitian Ambya dan Terminanto dapat menjelaskan temuan penelitian ini. Dampak negatif efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi mengandung makna bahwa pengurangan belanja pemerintah dalam rangka peningkatan efisiensi keuangan daerah akan berdampak pada penurunan permintaan agregat, sehingga memicu penurunan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kepulauan Nias masih bergantung pada belanja pemerintah, baik belanja rutin maupun belanja infrastruktur.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kepulauan Nias. Hal ini sejalan dengan penelitian Dewi & Suputra (2017) dan Fajri (2016). Belanja modal merupakan dana yang dialokasikan sebagai sumber pembiayaan infrastruktur ekonomi. Oleh karena itu, belanja modal selayaknya mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kepulauan Nias. Hal ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah daerah di Kepulauan Nias lebih banyak terkonsentrasi untuk membiayai belanja rutin, bukan untuk membiayai infrastruktur ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah dalam pengalokasian belanja daerah cenderung memprioritaskan belanja rutin dibanding belanja modal (Adyatma & Oktaviani, 2015; Dewi & Suyanto, 2015; Nuarisa, 2013). Hal ini menyebabkan belanja daerah menjadi tidak produktif. Jika pemerintah daerah menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah (Harianto & Adi, 2007).

Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal

Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja modal tidak memediasi hubungan antara PAD dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kepulauan Nias. Dalam hal ini, belanja modal tidak memperkuat pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Kabupaten/kota di Kepulauan Nias seperti dijelaskan sebelumnya memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sangat rendah. Akibatnya PAD tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ditambah lagi alokasi pengeluaran pemerintah lebih banyak difokuskan pada belanja barang jasa, bukan belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Irvan & Karmini (2016).

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal

Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja modal memediasi hubungan antara dana perimbangan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kepulauan Nias. Dalam hal ini, belanja modal dapat memperkuat pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah kabupaten/kota di Kepulauan Nias masih sangat bergantung pada dana perimbangan sebagai sumber utama belanja daerah. Dana perimbangan yang diterima sebagian dialokasikan untuk belanja modal, sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Irvan & Karmini (2016).

Penelitian ini menekankan pentingnya perencanaan dan pengalokasian belanja modal secara tepat agar dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat memberi dampak terhadap ekonomi. Alokasi belanja modal yang salah sasaran akan menyebabkan daerah tersebut kehilangan benefit (Prastiwi & Aji, 2020). Ada kalanya daerah-daerah yang masih tertinggal mengalami kekurangan dana untuk pembangunan, karena kapasitas fiskal yang kecil. Namun, celah fiskal tersebut dapat ditutup oleh dana perimbangan (Saraswati & Nurharjanti, 2021), sehingga pembangunan daerah tetap jalan. Yang terpenting, dana dari pemerintah pusat

tersebut digunakan untuk hal-hal yang memberikan dampak jangka panjang terhadap akselerasi perekonomian.

Pengaruh Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal

Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja modal memediasi hubungan antara efisiensi pengelolaan keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kepulauan Nias. Artinya, belanja modal mampu memperkuat pengaruh efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Adanya Efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat menghindari pemborosan anggaran. Dana yang diperoleh dari penghematan anggaran dapat dialokasikan untuk menambah belanja modal, sehingga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ayu et al. (2019). Efisiensi pengelolaan keuangan daerah wajib diterapkan oleh setiap daerah. Efisiensi keuangan berkaitan erat dengan pengalokasian anggaran tepat sasaran, sehingga tidak ada anggaran yang terpakai sia-sia. Dalam hal ini, efisiensi keuangan dapat memastikan bahwa setiap anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, baik dalam rangka peningkatan pembangunan, maupun peningkatan pelayanan umum. Rondonuwu et al. (2015) menyatakan efisiensi pengelolaan keuangan diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu PAD secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal. Dana perimbangan dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Selanjutnya, dana perimbangan dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan PAD dan belanja modal secara parsial berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengujian kelayakan belanja modal sebagai variabel intervening membuktikan bahwa belanja modal mampu memediasi pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal juga mampu memediasi pengaruh efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, disisi lain belanja modal tidak memediasi pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini melihat adanya indikasi ketergantungan yang sangat tinggi pemerintah daerah di Kepulauan Nias terhadap pemerintah pusat lewat dana perimbangan. Hal ini disebabkan kegagalan pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi daerah, sehingga kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi sangat rendah. Penelitian ini mendorong pemerintah kabupaten/kota di Kepulauan Nias untuk menggali dan memaksimalkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing, baik dari sektor pertanian, pariwisata, maupun kelautan dan perikanan, disamping juga memperkuat belanja modal dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi, Penelitian ini berimplikasi pada perumusan kebijakan peningkatan PAD, penentuan alokasi belanja modal dan peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kepulauan Nias.

Referensi

- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 190–205.
- Ahaddin, M. F. (2019). Pengaruh DAU dan DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarmasin Effect Of DAU and DAK on Economic Growth Of Banjarmasin City. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(4), 935–944.
- Aluthge, C., Jibir, A., & Abdu, M. (2021). Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Nigeria, 1970-2019. *Central Bank of Nigeria Journal of Applied Statistics*, 12(1), 139–174. <https://doi.org/10.33429/cjas.12121.6/6>
- Ambya, A. (2020). How Government Spending on Public Sector Affect The Economic Growth? *JEJAK*, 13(1), 218–229. <https://doi.org/10.15294/jejak.v13i1.21943>
- Arina, M. M., Koleangan, R. A. M., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomikota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(3), 26–35.
- Arlintang, N. O., Indrawati, L. R., & Septiani, Y. (2020). Analisis Pengaruh Investasi, Belanja Modal, dan Infrastruktur Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2018. *DINAMIC DIRECTORY JOURNAL OF ECONOMIC*, 2(2), 573–586.
- Aryanto, W., & Handaka, R. D. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia,

- dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 2(2), 52–63.
- Ayem, S., & Pratama, D. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. *Akuntansi Dewantara*, 2(2), 169–182.
- Ayu, A. L., Rahayu, S., & Junaidi. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Keuangan*, 4(2), 1–15.
- Baeti, N. (2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3), 85–98.
- Batubara, A. F., & Retnandari, N. D. (2017). Analisis Faktor Penyebab Ketertinggalan Kabupaten-Kabupaten di Pulau Nias Provinsi Sumatera Utara.
- Chandra, D., Hidayat, S., & Rosmeli. (2017). Dampak dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 12(2), 67–76.
- Dewi, N. W. R., & Suputra, I. D. G. D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1745–1773.
- Dewi, & Suyanto. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 9–21.
- Didu, S., & Fauzi, F. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1), 100–114.
- Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Dinamika- Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(8), 8–21.
- Fajri, A. (2016). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 29–35.
- Harahap, J. P. R., Daulay, M., & Torong, Z. B. (2018). Pengaruh Faktor-Faktor Kinerja Keuangan, Size, Leverage, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Moderating Pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara. *KITABAH*, 2(1), 47–64.
- Hariato, D., & Adi, P. H. (2007). Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar*, 1–26.
- Iriyena, P., Naukoko, A. T., & Siwu, H. F. Dj. (2019). Analisis Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kaimana 2007-2017. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(2), 49–59.
- Irvan, I. P., & Karmini, N. L. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(3), 338–362.
- Komariah, D., Yogiantoro, M., & Hukom, A. (2019). Pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(S1), 523–532.
- Lutpikah, N. W., & Mahendra, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2017-2019. *AKTUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 147–158.
- Manek, M., & Badrudin, R. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Telaah Bisnis*, 17(2), 81–98.
- Muttaqin, E. E., Sari, W. P., Ritonga, P., & Fadillah, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.34007/ebmsj.v1i1.7>
- Ningsih, E. K., & Noviaty, D. E. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan 2014-2018. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 3(2), 91. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v3i2.67>
- Nuarisa, S. A. (2013). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1), 89–94. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Nuraini, I. (2017). Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global” Malang*, 78–93.
- Nurulita, S., Arifulsyah, H., & Yefni. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Riau. *Jurnal*

- Benefita, 3(3), 336–356. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i3.3350>
- Oktavianti, Y. A., & Idayati, F. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(11), 1–20.
- Omodero, C. O., Ekwe, M. C., & Ihendinihu, J. U. (2018). The Impact of Internally Generated Revenue on Economic Development in Nigeria. *Accounting and Finance Research*, 7(2), 166–173. <https://doi.org/10.5430/afr.v7n2p166>
- Pambudy, A. P., & Syairozi, M. I. (2019). Analisis Peran Belanja Modal dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Kesejahteraan Masyarakat. *EKOBIS*, 20(1), 26–39.
- Panjaitan, H. M. A., Mulatsih, S., & Rindayati, W. (2019). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 8(1), 43–61. <https://doi.org/10.2944/jekp.8.1.43-61>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.
- Prasetyo, R. B., & Firdaus, M. (2009). Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), 222–236.
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *JURNAL KAJIAN BISNIS*, 28(1), 89–105.
- Purnama, N. I. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara. *EKONOMIKAWAN*, 17(1), 62–70.
- Putra, W. (2020). Efisiensi Anggaran Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 41–55.
- Putri, R. S., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat. *JASa (Jurnal Akuntansi Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 3(2), 256–268.
- Rani, F. A., Syahbandir, M., & Purnama, E. (2010). Kontribusi PAD dalam APBD sebagai Indikator Keberhasilan Otonomi Daerah. *KANUN*, 50, 235–255.
- Ranis, G. (2004). Human Development and Economic Growth. *ECONOMIC GROWTH CENTER*, 887. <http://www.econ.yale.edu/~egcenter/http://ssrn.com/abstract=551662http://www.econ.yale.edu/~egcenter/research.htm>
- Rondonuwu, R., Tinangon, J., & Budiarmo, N. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 3(4), 23–32.
- Rosita, I. A. P. M., & Sutrisna, I. K. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 7(7), 1445–1471.
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan Sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 8(2), 54–68.
- Saraswati, & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *PROSIDING BIEMA*, 51–64.
- Setiyawati, A., & Hamzah, A. (2007). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211–228. <https://doi.org/10.21002/jaki.2007.11>
- Škare, M., & Družeta, R. P. (2016). Poverty and economic growth: a review. *Technological and Economic Development of Economy*, 22(1), 156–175. <https://doi.org/10.3846/20294913.2015.1125965>
- Soleh, A. (2014). Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Ekombis Review*, 2(2).
- Suharlina, H. (2020). Pengaruh Investasi, Pengangguran, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Serta Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan 2020*, 56–72.
- Sukmawati, M. (2020). Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (SIMBA) II SIMBA Prosiding (Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi). *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi (SIMBA) II SIMBA Prosiding (Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi)*.
- Susanto, W., & Sugiyanto, C. (2019). The Structure of Regional Original Revenue and Its Effect on Economic Growth: Facts from Regencies and Cities in Central Jawa The Structure of Regional Original Revenue and Its Affect on Economic Growth: Facts from Regencies and Cities in Central Jawa. *The Indonesian Journal of Development Planning*, III(1), 68–102.
- Talangamin, O. B., Kindangen, P., & Koleangan, R. A. M. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di

- Kota Tomohon. *Jurnal Pembangunan Ekonomidan Keuangan Daerah*, 19(3), 41–51.
- Terminanto, A. A., & Rama, A. (2017). Pengaruh Belanja Pemerintah dan Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Data Panel Provinsi di Indonesia. *IQTISHADIA*, 10(1), 97–129. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i1.2320>
- Tuwo, R. D., Rotinsulu, D. C., & Kawung, G. M. V. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(4), 79–90.
- Waryanto, P. (2017). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review*, 2(1), 35–55.
- Wati, M. R., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 63–76.
- Waweru, D. (2021). Optimization View project The opinion of intellectuals: questions and answers View project Government Capital Expenditure and Economic Growth: An Empirical Investigation. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 21(8), 29–36. <https://doi.org/10.9734/AJEBA/2021/v21i83040>
- Wirabrata, A., Aditua, S., & Silalahi, F. (2012). Hubungan Infrastruktur Transportasi dan Biaya Logistik. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 3(1), 79–90.
- Wiraswasta, F., Pudjihardjo, M., & Adis, P. M. (2018). Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2009-2014). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 170–180.
- Zega, Y. T., Mursalin, D., & Yudhistira, I. P. (2022). Ketimpangan Pembangunan dan Konvergensi Pendapatan Antarkabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 188–207.